

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO 41 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI  
GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN  
DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
GURU DI SD NEGERI 028068 BINJAI TIMUR**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**RABIATUL ADAWIYAH**

**NPM: 1303100111**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, RABIATUL ADAWIYAH, NPM 1303100111, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, April 2017

Yang menyatakan,

RABIATUL ADAWIYAH

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 41 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU DI SD 028068 KECAMATAN BINJAI TIMUR**

**RABIATUL ADAWIYAH**

**1303100111**

Tunjangan adalah benefit yang dipandang sebagai sumbangan yang berbentuk uang yang diberikan suatu perusahaan atau lembaga kepada tenaga kerjanya diluar upah dan gaji untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Tunjangan guru yang merupakan balas jasa yang dibayarkan secara tidak langsung seperti asuransi jiwa dan kesehatan, cuti, pensiun, dan lain sebagainya kepada pegawai guna untuk meningkatkan kesejahteraan kerja karyawan/pegawai.

Tujuan penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Guru di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala dalam pendistribusian dana tunjangan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dengan analisa kualitatif untuk mengulas lebih dalam kebijakan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut sudah dijalankan . namun pelaksanaannya saja yang belum berjalan dengan baik. karena masih ada pihak-pihak terkait melakukan pemotongan administrasi serta dana yang dikeluarkan atau yang dikirim tidak tepat waktu. Hal-hal tersebut pula yang menyebabkan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut dapat dikatakan belum berjalan dengan begitu baik.

**Kata kunci:** Tunjangan Profesi Guru dan dosen, Tunjangan Khusus Guru dan dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada umat manusia, salah satunya adalah keberhasilan dan kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumantera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini di dapatkan melalui proses perkuliahan yang di laksanakan.

Skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 41 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU DI SD NEGERI 028068 BINJAI TIMUR”**

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat :

1. Ayahanda tersayang Alm.Amran dan ibunda tercinta Aminah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, perhatian, doa serta bantuan materil kepada penulis dalam masa perkuliahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dedi Amrizal S.Sos,M.Si selaku dosen pembimbing I yang sudah banyak membantu dan membimbing penulis tanpa henti dengan motivasinya , serta arahnya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Marlinang Sibuae., M.Pd selaku pembimbing II yang dengan penuh kearifan membimbing serta mengarahkan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan seluruh staff pegawai biro yang penulis hormati dan tidak bisa penulis uraikan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah membagikan ilmunya dan juga telah memberikan bimbingan studi serta pelayanan yang sebaik-baiknya,

sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak kepala sekolah beserta guru-guru SD 028068 Binjai Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Abangda Brigadir Surya Darma, Yudi Purnomo, Dedek sugiono, Hendro Pranolo yang begitu peduli kepada kesuksesan penulis.
10. Kepada Kakak tercinta dan tersayang Desi Afriani dan Merna Kasfi yang begitu peduli kepada kesuksesan penulis.
11. Kepada Sahabat teristimewa Fikky Wulandari, S.Pd , Desi Ratna Sari, SE , Nicky Echa Taqwaya yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini
12. Kepada Sahabatku teristimewa Risky Arliany Zuhri, Khairunnisag Tanjung, Dini Aryani, Riri Mailina yang saling memotivasi satu sama lain, serta berjuang dalam penyusunan skripsi masing-masing
13. Kepada yang terkasih dan teristimewa Hardi Yudha, S.Pd, M.Si yang tiada henti-hentinya dalam memberikan motivasi serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan serta uraikan namanya satu persatu secara detail, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah membantu penulis dalam poses penulisan skripsi ini.

Seiring do'a dan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dan kepada penulis semoga diberikan kekuatan berfikir serta wawasan yang semakin luas yang telah menyelesaikan tugasnya baik perkuliahan maupun skripsi.

Penulis menyadari apa yang terkandung dalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hal itu saran dan nasehat yang bersifat membangun masih sangat penulis harapkan.

Medan,     Maret 2017

Penulis

**RABIATUL ADAWIYAH**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Konsep Kebijakan .....	8
1. Pengertian Kebijakan .....	8
B Konsep Kebijakan Publik.....	9
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	9
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik .....	10

3. Unsur-unsur Kebijakan Publik .....	11
C. Konsep Implementasi.....	12
1. Pengertian Implementasi .....	12
2. Pendekatan Implementasi .....	13
3. Fungsi Implementasi .....	14
D. Konsep Implementasi Kebijakan.....	14
E. Konsep Implementasi Kebijakan Publik .....	15
F. Konsep Pendidik .....	20
1. Pengertian Pendidik .....	20
2. Tugas dan Peran Guru .....	21
a. Tugas Guru .....	21
b. Peran Guru .....	22
G. Pengertian Dosen .....	23
H. Konsep Tunjangan .....	24
1. Pengertian Tunjangan .....	24
2. Pengertian Tunjangan Profesi Guru .....	25
3. Pengertian Tunjangan Khusus Guru .....	26
4. Pengertian Tunjangan Kehormatan Profesor .....	32

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian .....	33
B. Kerangka Konsep .....	33
C. Definisi Konsep.....	35
D. Kategorisasi .....	36
E. Narasumber .....	37

F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Lokasi Penelitian .....	40
I. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	41
1. Sejarah Singkat Sekolah Dasar .....	41
2. Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 028068 .....	41
3. Struktur Organisasi Sekolah .....	41

#### BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Wawancara.....	43
1. Adanya Aspek yang Mempengaruhi Kehidupan .....	45
2. Adanya Tujuan Mengatasi Masalah .....	46
3. Adanya Proses Kegiatan Administrasi .....	47
4. Adanya Manfaat Pelaksanaan Kebijakan .....	48
B. Analisis Hasil Wawancara .....	49
1. Adanya Aspek yang Mempengaruhi Kehidupan .....	49
2. Adanya Tujuan Mengatasi Masalah .....	51
3. Adanya Proses Kegiatan Administrasi .....	54
4. Adanya Manfaat Pelaksanaan Kebijakan .....	56

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Struktur Organisasi sekolah Dasar Negeri 028068 Kecamatan  
Binjai Timur

Gambar 3.3 Lokasi Penelitian

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Narasumber Berdasarkan Status

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Struktur Organisasi

Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran III : Daftar Jawaban Wawancara

Lampiran IV : Surat Penetapan Judul dan Skripsi

Lampiran V : Surat Izin Penelitian

Lampiran VI : Surat telah selesai melakukan penelitian

Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu aspek sosial dari program pembangunan nasional yang harus diperhatikan dan menjadi sesuatu yang sangat penting karena berhubungan dengan aset, modal, potensi kemajuan suatu bangsa dan juga merupakan agen perubahan (agent of change).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah RI untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mengamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Maka untuk itu pemerintah selalu mengupayakan usaha peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara dan ragamnya , mulai dengan cara yang sifatnya lokal di tingkat sekolah yang bersangkutan, dinas pendidikan setempat akan tetapi juga oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Usaha ini akan dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang mengalami kemerosotan baik dari segi mutu siswanya maupun gurunya. Guru merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar untuk menghasilkan siswa yang berkualitas, maka untuk menciptakan siswa yang berkualitas salah satunya dengan meningkatkan disiplin kerja guru serta dalam proses upaya peningkatan kesejahteraan guru.

Kesejahteraan guru merupakan masalah pokok yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, karena kesejahteraan guru sangat menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan seorang guru dalam melakukan pekerjaan dengan baik untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Namun, pencapaian prestasi kerja belum maksimal dikarenakan rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak guru yang belum memiliki kinerja yang profesional. Banyak yang mengatakan penyebab dari ketidak profesionalan kinerja mereka karena rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru diduga dipengaruhi adanya kendala dalam proses pendistribusian dana dalam pelaksanaan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan guru dan dosen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan diterbitkan Peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor sebagai penunjang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan mengingat undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 3 menyebutkan, "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, bertanggung

jawab” . Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah dibanyak negara dan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Guru- guru pada umumnya tidak begitu melibatkan diri dalam usaha mencari uang , namun menginginkan ada jaminan ekonomis, agar dapat menutupi biaya kehidupan sehari-hari menurut keperluannya. Untuk mencari jaminan ini guru atau anggota keluarganya sering terpaksa mencari sumber-sumber finansial lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa aspek finansial dapat menimbulkan ketegangan di kalangan guru, dan hasil belajar mengajar tidak optimal.

Demikian juga halnya di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur tidak terlepas dari permasalahan sebagaimana yang di uraikan diatas. Dari jumlah guru sebanyak 20 orang guru terdiri atas 16 orang guru PNS dan 4 orang guru Non PNS, dan dengan jumlah siswa/i sekitar 331 orang masih merasakan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tunjangan tersebut. Dana tunjangan berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tunjangan untuk guru (PNS) dan dosen yang berada diluar dari gaji pokok, diantaranya:

- a. Tunjangan fungsional
- b. Tunjangan untuk suami/istri
- c. Tunjangan askes (kesehatan)
- d. Tunjangan beras
- e. Tunjangan anak
- f. Tunjangan hari tua

Sedangkan tunjangan yang di dapat oleh guru honor (Non PNS) adalah:

a. Tunjangan insentif

Tunjangan ini dikeluarkan 6 bulan sekali setelah masa kerja sudah 2 tahun.

Untuk tunjangan ini guru mendapatkan dana tunjangan tersebut

b. Tunjangan gubernur

Tunjangan ini dikeluarkan 6 bulan sekali. Tunjangan ini guru PNS juga menerima nilai yang sama.

Tunjangan-tunjangan tersebut berasal dari pemerintah pusat, daerah dan yang menjadi kendala dalam pendistribusian dana tunjangan adalah terletak dari pemerintah pusat yang terkesan lambat dalam menyalurkan dana tunjangan tersebut. Akibatnya berbagai keluhan dirasakan oleh para guru contohnya tidak adanya disiplin untuk melakukan proses belajar mengajar, walaupun tanpa adanya tunjangan seorang guru harus tetap disiplin dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, adanya tunjangan merupakan faktor untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tetapi, dana tunjangan yang begitu mereka harapkan belum terealisasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat kenyataan dilapangan seperti di SD Negeri 028068, dengan adanya tunjangan-tunjangan tersebut diharapkan para guru dapat memberikan perubahan terhadap kinerja dalam proses belajar mengajar agar tercipta siswa siswi yang berkualitas serta meningkatnya mutu pendidikan. Bertitik tolak dari uraian diatas. Maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul : “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan

Dosen, Serta Tunjangan Kehormatn Profesor Dalam Rangka Meningkatkan Semangat Kerja Guru Di Sd Negeri 028068 Binjai Timur”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan peraturan pemerinta no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan guru dan dosen di SD Negeri 028068 Binjai Timur ?
2. Apa kendala pendistribusian dana pelaksanaan tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan guru dan dosen di SD Negeri 028068 Binjai Timur ?

## **C. Tujuan dan manfaat**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan guru dan dosen di SD Negeri 028068 Binjai Timur.
  - b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala pendistribusian dana tunjangan di SD Negeri 028068 Binjai Timur.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian dapat dijadikan bahan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang pengembangan kebijakan pendidikan di FISIP UMSU
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan serta bahan pertimbangan dalam pelaksanaan analisis serta pengambilan keputusan terhadap masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tunjangan guru di SD Negeri kecamatan Binjai Timur.
- c. Dapat memberikan gambaran dan masukan dalam rangka pelaksanaan tunjangan guru di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Proposal ini di susun secara sistematis, logis, dan konsisten, agar dapat melihat dan mengkaji penelitian secara teratur dan sistematis, maka penulismembuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antar bab yang satu dengan yang lainnya.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika penulisan.

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Terdiri dari : Konsep kebijakan, Konsep Kebijakan publik, Konsep Implementasi, Konsep Implementasi kebijakan, Konsep Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Pendidik, Pengertian Dosen, Pengertian Profesor, Konsep Tunjangan, Pengertian Tunjangan Kehormatan Profesor.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Terdiri dari : Metode Penelitian, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Lokasi penelitian, Narasumber.

#### **BAB IV : PENYAJIAN DATA**

Terdiri dari : Hasil Analisis Data, Dan Pembahasan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Konsep Kebijakan**

##### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut Dunn (2003:17) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Menurut Friedrich (2007:173) menyatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dye (2007:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa kebijakan adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah, tentang pelaksanaan suatu undang-undang. kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

## **B. Konsep Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian kebijakan publik**

Menurut Dunn (2003:17) kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain lain.

Menurut Anderson (2005:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang di tetapkan oleh badan aparat pemerintah.

Menurut abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi kebijakan publik diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan : a) keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah) .b) berorientasi pada kepentingan publik dengan

mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dan dampak yang ditimbulkan. c) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. d) aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana kebijakan dilaksanakan.

## 2. Ciri-ciri umum kebijakan publik

Anderson (2006:41) menyatakan bahwa, sekalipun tujuan dari tindakan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan tidak selalu sama, namun secara umum kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Adapun ciri-ciri tersebut adalah : a) *public policy is purposive, goal-oriented behavior rather random or change behavior*. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya, artinya: pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar hasil buatan atau karena kebutuhan ada kesempatan yang membuatnya . Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan; b) *public policy consist of courses of action-rather than separate discrete desicion or action-performend by government official*. Maksudnya suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisahnya dari kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan , intervensi dan penegakan hukum; c). *public is what goverment do-not what they say will do or what they intend to do*. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintahan bukan apa yang ingin atau di lakukan pemerintah; d). *public policy my be either negative or positive*. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan; e). *public policy is based on law and is autdhoritative*. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi;

### **3. Unsur-unsur kebijakan publik**

Wahab (1997:25) menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif :Proses kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses kebijakan terdapat tahap-tahap sebagai berikut : identifikasi masalah dan tujuan, formulasi terdapat 5 unsur kebijakan yakni : a) unsur pertama , tujuan kebijakan . telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan , namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan . perbedaan tidak hanya terletak pada jangka waktu mencapai tujuan yang dimaksud. Tetapi juga pada posisi, gambaran orientasi dan dukungannya. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria yaitu : diinginkan untuk dicapai, rasional atau realitis (rational dan realitis, jelas (clear), dan berorientasi kedepan (future oriented). b) unsur kedua, masalah. masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar. Dengan kata lain dapat dikatakan, jika suatu masalah dapat diidentifikasi secara tepat, berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai. c) unsur ketiga, tuntutan (demand). Tuntutan muncul, anantara lain karena salah satu dari 2 sebab yaitu: pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan

yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. ini terjadi karena mereka tidak mempunyai peluang ikut dalam proses perumusan kebijakan , atau karena kalah dalam persaingan antar berbagai kekuatan, sekalipun jumlah mereka mungkin cukup besar dalam masyarakat. Kedua, karena munculnya kebutuhan baru setelah suatu tujuan tercapai atau masalah terpecahkan. d) unsur keempat, dampak atau outcomes. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif atau negatif , dampak yang juga ada yang bersifat positif atau negatif yang diharapkan terdiri dari suatu tindakan kebijakan. e) unsur kelima, sarana atau alat kebijakan (policy instrument). Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain. Kekuasaan, intensif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

### **C. Konsep Implementasi**

#### **1. Pengertian Implementasi**

Menurut Grindle (1980:7) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah di salurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Selain itu, perlu di dasari bahwa apa yang terjadi saat implementasi akan memengaruhi hasil akhir kebijakan. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang di inginkan akan besar jika sejak tahap merancang bangun kebijakan tersebut telah dipikirkan matang berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain : a) adanya tujuan yang ingin dicapai. b) adanya kebijakan-kebijakan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. c) adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. d) adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. e) adanya strategi dalam pelaksanaan.

## **2. Pendekatan Implementasi**

Ripley dan Franklin (1986:71) mendasarkan beberapa tipe kebijakan: a) distributif, hal ini mengacu pada efek-efek pelaksanaan yang memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok masyarakat. b)

competitive, hal ini berpengaruh pada persaingan dimana keputusan yang diambil harus yang terbaik agar pada pelaksanaannya pun berjalan dengan baik. c) regulator, mengacu pada patokan-patokan dan pengawasan-pengawasan pemerintah yang tampaknya mempengaruhi tingkah laku masyarakat .tipe ini juga dikembangkan untuk menanggapi praktek-praktek yang mengakibatkan beberapa alasan tidak dapat di terima sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi berupa pengaturan dan perbatasan. d) redistributive, melibatkan sebuah usaha sadar yang dilakukan pemerintah memanipulasi dari kekayaan, pennghasilan, hak beberapa nilai lain dikalangan kelas-kelas dan kelompok-kelompok dalam masyarakat luas.

### **3. Fungsi Implementasi**

Fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan negara diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang ada dalam ilmu kebijaksanaan diisebut dengan sistem penyampaian kebijaksanaan. Implementasi ini dilaksanakan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan itu akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

## **D. Konsep Implementasi Kebijakan**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Dwijowijoto(2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya . tidak lebih dan tidak

kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Menurut Wahab (2005:101) implementasi kebijakan diartikan sebagai “to provide the means for carrying out(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu);to give practical effect to(menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Dan beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan itu adalah proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **E. Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Tangklian (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan

eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tacjhan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Wahab (1997:59) tujuan dalam mempelajari implementasi kebijakan publik adalah menyangkut konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Abdullah (1988:22) ada tiga komponen penting dalam implementasi kebijakn publik yang harus selalu ada yaitu :

Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan :

- Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- Unsur pelaksanaan (implementers), baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari program implementasi tersebut.

Edward dalam widodo (2011:96-110) mengajukan 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakn publik, diantaranya ialah :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara menurut widodo (2011:97) komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

b. Sumberdaya

Edward dalam widodo( 2011:98) mengemukakan bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut.Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai secara efektif maka implementasi kebijakan publik tersebut tidak akan efektif. Adapun yang mempengaruhi sumberdaya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

c. Sumberdaya manusia

Kualitas sumberdaya manusia berhubungan dengan ketrampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas berhubungan dengan jumlah sumberdaya manusia.

d. Anggaran

Anggaran berhubungan dengan ketersediaan modal dalam pencapaian suatu kebijakan.

e. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud disini seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran yang akan menunjang keberhasilan implementasi suatu program kebijakan.

f. Informasi atau kewenangan

Informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sedangkan kewenangan berperan dalam meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang di kehendaki.

g. Prilaku

Sikap maupun karakteristik dari pelaksanaan kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, namun tidak jika sebaliknya.

h. Struktur birokrasi

Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki standar operation procedur (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Selain memiliki faktor pendukung implementasi kebijakan publik, faktor penghambatnya pun turut ada. Menurut Sunggono (1994:149-153) implementasi kebijakan publik mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

a. Isi kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan. Maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana dan prasarana serta penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau anggaran dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlihat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### d. Pembagian potensi

Dalam hal ini berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

### **F. Konsep Pendidik**

#### **1. Pengertian pendidik**

Dari segi bahasa, makna pendidik sebagaimana dijelaskan oleh WJS. Poerwadarmita(1991:250) adalah orang yang mendidik . pengertian ini terlihat jelas bahwa guru adalah orang yang melakukan kegiatan dengan memberi atau mengajarkan sesuatu (ilmu pengetahuan) kepada obyek didik (anak murid) dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa inggris ditemui pula beberapa kata yang berdekatan artinya dengan guru.

Nata, (1999:61) kata tersebut seperti teacher yang di terjemahkan sebagai pendidik atau pengajar dan tutor yang berarti guru pribadi atau guru yang mengajar dirumah.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pendidik (guru) yang akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan lainnya, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena pendidik akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya apabila berada dalam konteks yang hampa, tidak ada aturan yang jelas, tidak didukung sarana prasarana yang memadai, tidak dilengkapi dengan pelayanan dan sarana perpustakaan serta sumber belajar lain yang mendukung. Karena itulah pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidik atau guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas melakukan kegiatan atau proses belajar mengajar, serta berinteraksi langsung dengan peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas atau perannya dengan baik.

## **2. Tugas dan peran guru**

### **a. Tugas guru**

Sebagai seorang pendidik yang memahami fungsi dan tugasnya, guru khususnya ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan ketrampilan keguruan dan pada kondisi itu pula ia belajar memersosialisasikan sikap keguruan yang diperlukannya.

Menurut Rostiyah dalam Djamarah,( 2000:36) mengemukakan bahwa fungsi dan tugas guru profesional adalah menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian.

Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih.

Tugas guru dalam kemanusiaan adalah memposisikan dirinya sebagai orang tua kedua. Dimana ia harus menarik simpati dan menjadi idola para siswa. Adapun yang diberikan atau disampaikan guru hendaklah dapat memotivasi hidupnya terutama dalam belajar. Bila seorang guru berlaku kurang menarik, maka kegagalan awal akan tertanam dalam diri siswa.

#### **b. Peran guru**

##### 1) Dalam Proses Belajar Mengajar

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa peran seorang guru sangat signifikan dalam proses belajar mengajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal seperti sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, konsuler, eksplorator, dsb. Yang akan dikemukakan disini adalah peran yang dianggap paling dominan dan klasifikasi guru sebagai : a) demonstrator; b) manajer/pengelola kelas; c) mediator/fasilitator; d) evaluator

##### 2) Dalam pengadministrasian

Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai : a) Pengambil inisiatif, pengaruh dan penilai kegiatan pendidikan; b) wakil masyarakat; c) ahli dalam bidang mata pelajaran; d) penegak disiplin; e) pelaksana administrasi pendidikan

### 3) Sebagai pribadi

sebagai dirinya sendiri guru harus berperan sebagai : a) petugas sosial; b) Pelajar dan ilmuan; c) orang tua; d) teladan; e) pengaman.

### 4) Secara psikologis

Peran guru secara psikologis adalah : a) ahli psikologi pendidikan; b) relationship; c) catalytic/ pembaharu; d) ahli psikologi perkembangan.

## **G. Pengertian Dosen**

Undang-undang No 14 Tahun 2005 Tentang pasal (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, ketrampilan, sikap perilaku yang dikuasai. Dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu : a) kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya; b) Kompetensi pedagogik, yakni penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa; c) kompetensi

kepribadian, yakni kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya; d) kompetensi sosial, yakni ,kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial ,dan mampu bekerja dalam team work.

## **H. Konsep Tunjangan**

### **1. Pengertian tunjangan**

Menurut Moekijat (1999:17) tunjangan adalah balas jasa tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerjanya diluar upah dan gaji guna meningkatkan semangat kerja karyawan.

Menurut Hasibuan (1997:133) tunjangan adalah kompetensi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka .

Sedangkan menurut Gary Dessler yang diterjemahkan oleh Agus Dharma (1993:444) adalah pembayaran tidak langsung yang diberikan kepada karyawan bisa mencakup misalnya, asuransi jiwa dan kesehatan, cuti, pensiun, rencana pendidikan dan rabat untuk produk-produk perusahaan .

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunjangan adalah benefit yang dipandang sebagai sumbangan yang berbentuk uang atau yang dibayarkan secara tidak langsung seperti asuransi jiwa dan kesehatan, cuti, pensiun, dan lain sebagainya kepada pegawai guna untuk meningkatkan semangat kerja karyawan/pegawai.

## **2. Pengertian Tunjangan Profesi Guru**

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

### **a. Besaran**

Bagi guru PNS besaran tunjangan profesi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok. Bagi guru buak PNS, tunjangan profesi diberikan setara dengan gaji pokok PNS sesuai dengan penetapan “in-passing” jabatan fungsional guru yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2007.

### **b. Sifat**

Tunjangan profesi bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang penyaluran tunjangan profesi.

### **c. Sumber Dana**

Dana untuk pembayarn tunjangan profesi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada dana dekonsentralisasi dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi.

d. Kriteria Guru Penerima

Tunjangan profesi diberikan kepada guru dan pengawas yang telah mendapat surat Keputusan Dirjen PMPTK tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi.

e. Pembayaran

Tunjangan profesi diberikan kepada guru terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi.

### **3. Pengertian Tunjangan Khusus Guru**

Bahwa guru mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Untuk ini para guru yang profesional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan proses pencerdasan anak bangsa. Dalam petunjuk teknis (juknis) penyaluran tunjangan bagi guru yang bertugas di daerah khusus, berikut kami mohon izin kepada pembaca untuk mengutip beberapa hal penting mengingat informasi ini sangat dibutuhkan oleh para guru-guru kita .dengan harapan akan menambah pengetahuan baru tentang tunjangan profesi untuk guru yang bertugas di daerah khusus.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru serta semangat kerja guru, disamping peningkatan profesionalismenya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang diberikan setara

dengan 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam , bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini bahwa pemberian tunjangan khusus dijelaskan sebagai berikut :

**a. Pengertian**

- Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi melaksanakan tugas di daerah khusus.
- Tunjangan khusus ditujukan untuk mewujudkan amanat undang-undang guru dan dosen antara lain mengangkat martabat guru , meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang , daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil,daerah perbatasan dengan negara lain,daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
- Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan dua ribu kilometer persegi yang memiliki titik-titik dasar koordinat

geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

- Guru yang mengajar di Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) adalah guru yang mengajar anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri, yang pada beberapa lokasi kondisinya, baik di lihat dari sisi geografis maupun morfologisnya dianggap sama dengan daerah khusus.

**b. Besaran**

- Jumlah dana tunjangan khusus bagi guru bukan PNS dan guru PNS yang telah di in-passing adalah setara satu kali gaji pokok , dikenakan pajak penghasilan (pph) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah dana dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS dan guru PNS yang belum di in-passing adalah sebesar Rp. 1.500.000,- per orang perbulan , dikenakan pajak penghasilan (pph) sesuai ketentuan yang berlaku.

**c. Sumber dan alokasi dana**

- Pemberian tunjangan khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan dalam DIPA Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia.

**d. Kriteria guru penerima**

Guru penerima tunjangan khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) guru yang ditugaskan pada satuan pendidikan di daerah khusus oleh pemerintah atau pemerintah daerah. b) guru yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat dan yang mendapatkan persetujuan

dalam bentuk keputusan dari pemerintah daerah. c) guru penerima tunjangan khusus sesuai dengan data penerima tunjangan khusus yang masih memenuhi kriteria yang ditetapkan. d) guru calon penerima tunjangan khusus yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan diusulkan oleh kabupaten/kota untuk menggantikan guru yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada poin a. e) guru yang bertugas di sekolah indonesia di luar negeri . memenuhi beban kerja guru 24 jam tatap muka per minggu atau yang diekuivalensikan dengan 24 jam tatap muka yang dibuktikan dengan SK / surat penugasan dari kepala sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. f) memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kerja (NUPTK). g) memiliki nomor rekening tabungan bank sebagai penampungan pembayaran tunjangan khusus.h) penugasan guru di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada poin a dan b didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**e. Kriteria Daerah Khusus**

Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain , termasuk lokasi sekolah indonesia yang berada di luar negeri dimana lokasi tersebut mempunyai kriteria sama dengan daerah khusus.

1. Daerah yang terpencil atau terbelakang adalah :a) daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan / pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau

terpencil seperti daerah yang memiliki pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh tertentu yang tidak dapat dicapai dengan jalan kaki ataupun tidak memiliki akses transportasi yang memadai. b) daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan baik transformasi maupun media komunikasi, serta tidak memiliki sumber daya alam.

2. Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relative rendah, serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang.
3. Daerah perbatasan dengan negara lain adalah ; a) bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan. b) pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2000km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. c) daerah yang mengalami bencana alam adalah daerah yang terletak di wilayah yang terkena bencana alam baik gempa, longsor, gunung api, maupun banjir yang berdampak sistematis yang negatif terhadap layanan pendidikan dalam waktu tertentu.

4. Bencana sosial dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi yang membahayakan guru dalam melaksanakan tugas dan layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
5. Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak tersangka-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera.
6. Sekolah indonesia diluar negeri adalah satuan pendidikan formal yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah.

Bahwa untuk mensukseskan program pemberian tunjangan khusus, pemerintah daerah diharapkan berperan lebih aktif melalui pemberdayaan APBD, sehingga dapat bersinergi dengan program pusat yang dibiayai oleh APBN . sinergi diharapkan terwujud melalui tambahan alokasi dana tunjangan guru dari APBD khususnya bagi mereka yang belum mendapatkan tunjangan khusus.

#### **4. Pengertian Tunjangan Kehormatan Profesor**

PEMERINTAH MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010

Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor . profesor adalah jabatan fungsional tertinggi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.

**a. Kriteria penerima tunjangan kehormatan**

Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan kehormatan setiap bulan.

**b. Besaran**

Tunjangan kehormatan bagi profesor pegawai negeri sipil diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal (16) tunjangan kehormatan bagi profesor bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi profesor pegawai negeri sipil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

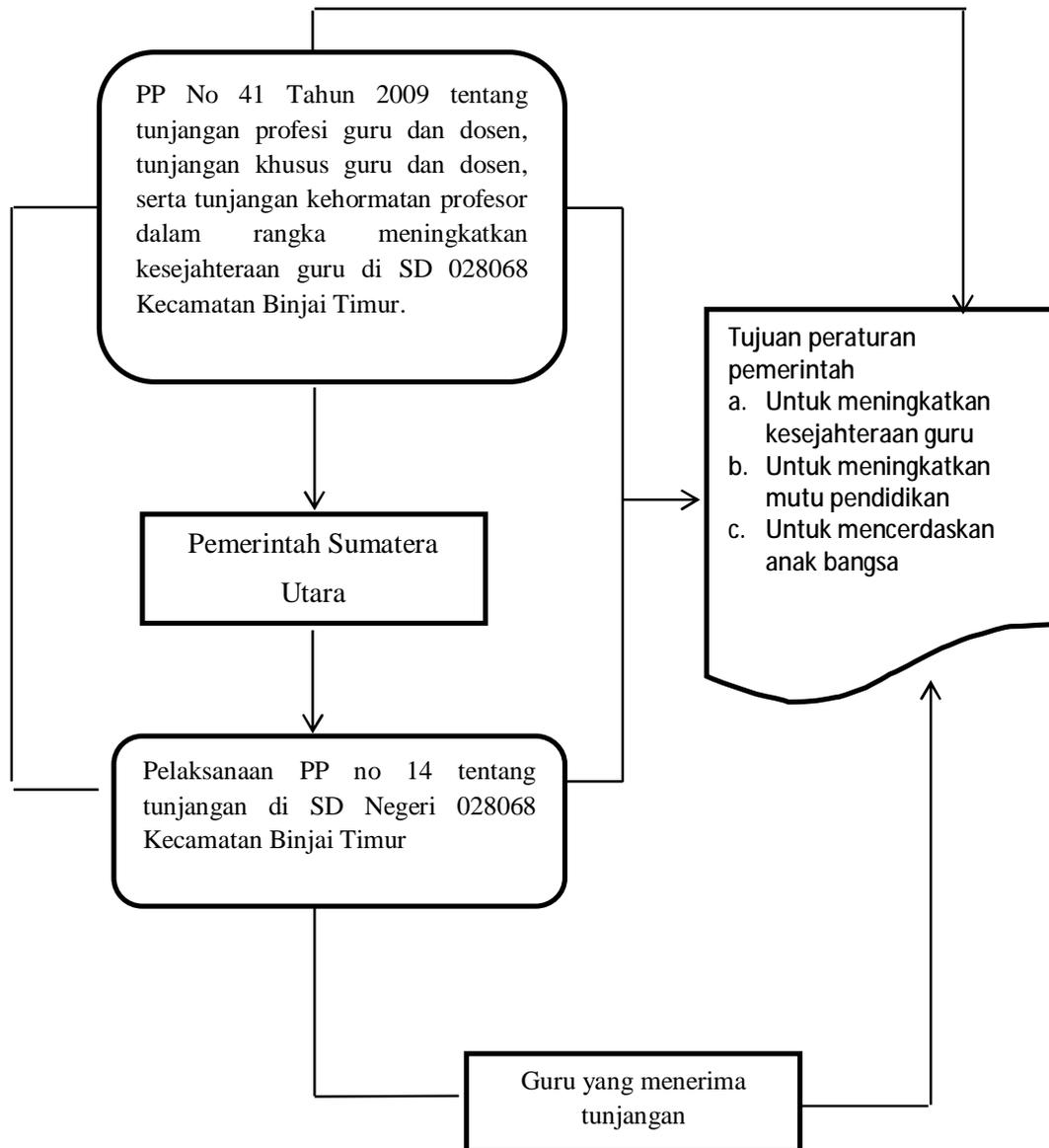
Data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan –bilangan ( tidak ditransdormasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika)

#### **B. Kerangka Konsep**

Berdasarkan judul penelitian , maka kerangka konsep Implementasi Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor Dalam Rangka Meningkatkan Semangat Kerja Guru di SD Negeri 028068 Binjai Timur.

Nawawi (1992:43) mengatakan bahwa kerangka konsep disusun sebagai pemikiran teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara teoritis berdasarkan persegi dan landasan teori yang dimiliki.

### Bagan Kerangka Konsep



Gambar 3.1

### C. Definisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan penulis dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. Kebijakan adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah, tentang pelaksanaan suatu undang-undang. kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.
2. Kebijakan publik adalah keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah) berorientasi pada kepentingan publik dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dan dampak yang di timbulkan.
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencana sudah di anggap sah.
4. Implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Implementasi kebijakan publik merupakan proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

6. Pendidik atau guru adalah seorang yang berdiri didepan kelas melakukan kegiatan atau proses belajar mengajar, serta berinteraksi langsung dengan peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas atau perannya dengan baik.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tunjangan adalah benefit yang dipandang sebagai sumbangan yang berbentuk uang atau yang dibayarkan secara tidak langsung seperti asuransi jiwa dan kesehatan , cuti, pensiun, dan lain sebagainya kepada pegawai untuk meningkatkan semangat kerja karyawan/pegawai.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui apa yang akan menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut: Adapun kategorisasi dalam penelitian yang berjudul : “Implementasi Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor Dalam Rangka Meningkatkan Semangat Kerja Guru di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur”, yaitu sebagai berikut :

- Adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan
- Adanya tujuan mengatasi masalah kehidupan yang muncul

- Adanya proses kegiatan administratif
- Adanya manfaat pelaksanaan kebijakan.

#### **E. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada penulis dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor Dalam Rangka Meningkatkan Semangat Kerja Guru di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Sekolah SD Negeri 028068 : Syapi'i Nasution, S.Pd
2. Guru PNS : Rahmawati, S.Pd
3. Guru PNS : Marito Gultom, S.Pd
4. Guru PNS : Tumatik, S.Pd
5. Pengawas Sekolah : Suparsih, S.pd

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Ali (1997:198) teknik pengumpulan data yang tepat untuk mendapatkan data kualitatif dan umumnya agak berbeda dengan pengumpulan data melalui data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

### 1. Data primer

Pengumpulan data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara wawancara , dan dokumentasi.

Wawancara dapat dilakukan secara :

Terbuka, peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada.

- Terfokus
- Terstruktur

### 2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian, data ini diperoleh melalui studi pustaka.

## **G. Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah analisis data secara umum

### 1. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul di dalam tahap pengumpulan data, kemudian perlu diolah kembali. Pengolahan data tersebut memiliki tujuan agar data lebih sederhana, sehingga semua data yang telah terkumpul dan menyajikannya sudah tersusun dengan baik dan rapi kemudian baru dianalisis.

Tahap-tahap dalam pengolahan data :

- a. Penyuntingan (editing) merupakan kegiatan yang memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden.
- b. Pengkodean (coding) adalah kegiatan setelah dilakukannya penyuntingan data, kegiatan berikutnya yaitu pengkodean yang dilakukan dengan menggunakan cara memberikan simbol atau tanda yang berupa angka terhadap jawaban responden yang diterima.
- c. Tabulasi (tabulating) merupakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean , kemudian akan disajikan dalam bentuk wujud tabel.

## 2. Penganalisisan Data

Apabila proses pengolahan data telah selesai, maka proses selanjutnya yaitu analisis data. Kemudian tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan dan juga memudahkan data untuk ditafsirkan. Setelah datanya sudah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok , yaitu data kuantitatif dengan bentuk angka-angka dan data kualitatif yang lebih dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol.

## 3. Penafsiran Hasil Analisis

Kemudian bila data sudah selesai dianalisis, kegiatan yang harus dilakukan yang menafsirkan hasil analisis data tersebut. Tujuan penafsiran analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis yang sudah diperoleh. Akhirnya peneliti bisa menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak hipotesis yang sudah dirumuskan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

#### **H. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian atau mengamati langsung. Adapun lokasi penelitian berada di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur.



Gambar 3.2

## **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Singkat Sekolah Dasar**

Sekolah Dasar Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur didirikan pada 6 April 1987 dan beroperasi pada 15 April 1987. Sekolah ini terletak di jalan Danau laut tawar. Status Sekolah Dasar yaitu Negeri, terletak di Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur . Luas tanah berkisar 2000M2, bangunan bersifat permanen, luas bangunan 351M2 .Tenaga guru berjumlah 20 orang, terdiri dari 16 orang guru PNS dan 4 orang guru non PNS. Proses kegiatan ngajar-mengajar dillaksanakan pada pagi hari sampai siang hari . Di SD N 028068 memiliki jumlah siswa/i yang terdiri dari 178 orang laki-laki dan 153 orang perempuan , total keseluruhan berjumlah 331 orang siswa/i.

### **2. Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 028068 Kecamatan Binjai**

#### **Timur**

Akreditasi sekolah yaitu B, tenaga guru di SD Negeri 028068 berjumlah 20 orang yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 12 orang wali kelas, 3 orang guru agama islam, 1 orang guru agama kristen , 2 orang guru penjaskes, 1 orang guru bahasa inggris dan 2 orang guru bagian tata usaha. Gedung sekolah dan fasilitas milik pemerintah dan milik sekolah. Serta kedisiplinan guru dalam mengajar.

### **3. Struktur Organisasi Sekolah**

Susunan pihak-pihak yang terkait dalam mengelola Sekolah Dasar 028068 Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Sumber Karya yang diatur seemikian rupa agar dalam suatu struktur organisasi mampu menjalankan program yang telah ditetapkan agar tercapainya suatu tujuan bersama.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Wawancara**

##### **1. Deskripsi Narasumber**

Penelitian ini dilakukan dilapangan langsung dan telah memperoleh beberapa data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur. Pada kesempatan ini , penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisa data-data yang diperoleh . Bab ini akan membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang jelas berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan .

##### **a. Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan . pada tabel 4.1 berikut di sajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1 Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	1	20 %
2	Perempuan	4	80%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau dengan persentase 80% sedangkan yang berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 1 orang atau dengan persentase 20%.

b. Narasumber Berdasarkan Status

Tabel 4.2 Narasumber Berdasarkan Status

No.	Status	Frekuensi	Persentase
1	PNS	5	100%
2	Non PNS	-	-
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari status PNS dengan frekuensi 5 orang atau dengan persentase 100%, sedangkan sisanya berasal dari status Non PNS tidak ada.

Sumber data dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 5 orang yang terdiri dari 3 orang guru kelas ,1 orang Kepala Sekolah dan 1 orang badan pengawas sekolah di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur. Dari penelitian yang

telah dilakukan oleh peneliti dilapangan telah diperoleh berbagai data dan informasi mengenai tanggapan dan pendapat para responden/narasumber mengenai aspek-aspek sebagai berikut :

### **1. Adanya Aspek Yang Mempengaruhi Kehidupan**

Adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Aspek tersebut merupakan tujuan dari peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut terkait dengan pemberian dana tunjangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syapi'i Nasution S.Pd selaku kepala sekolah SD 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwa adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan yaitu meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan guru. Menurut ibu Rahmawati S.Pd, Marito Gultom S.Pd , Tumatik S.Pd selaku guru PNS di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwa aspek yang mempengaruhi kehidupan guru yaitu meningkatkan kinerja seorang guru serta kesejahteraan guru yang mampu merubah kehidupan guru menjadi lebih baik lagi . Dalam hal ini terlihat jelas bahwa dengan adanya pendistribusian dana tunjangan yang di tujukan untuk guru dapat membantu perekonomian guru. Menurut ibu Suparsih S.Pd selaku badan pengawas sekolah bahwa adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan guru yaitu berupa apresiasi untuk seorang guru dalam meningkatkan kesejahteraan guru agar perekonomian seorang guru bisa dikatakan sangat terbantu.

## **2. Adanya Tujuan Mengatasi Masalah Yang Muncul**

Adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada didalam sekolah dasar SD 028068.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak syapi'i Nasution S.Pd selaku kepala sekolah mengatakan bahwa meningkatkan kesejahteraan guru dalam peningkatan mutu pendidikan serta profesionalitas kinerja yang minimum rendah, pemerintah juga bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian guru . agar para guru yang menerima tunjangan tidak tersendat dalam pendistribusiannya . sama halnya dengan ibu Rahmawati S.Pd , Marito Gultom S.Pd dan ibu Tumatik S.Pd berpendapat dengan adanya pelaksanaan kebijakan diharapkan kepada pemerintah agar pendistribusian dana tunjangan berjalan dengan baik , tepat pada waktunya agar kesejahteraan guru tercapai lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suparsih, S.Pd mengatakan bahwa , tujuan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam dunia pendidikan tidak dapat teratasi dengan baik karena para guru yang menerima dana tunjangan belum dapat memberikan perubahan terhadap kinerjanya akibat mutu pendidikan pun semakin rendah. Dan beliau berkata bahwasannya kesadaran dari masing-masing guru untuk meningkatkan kualitas kinerja guru .

## **3. Adanya Proses Kegiatan Administratif**

Proses kegiatan adminitratif bertujuan sebagai prosedur atau tata cara dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang akan dijalankan . Termasuk dalam

melaksanakan peraturan pemerintah No. 41 tahun 2009 harus melalui prosedur atau tata cara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syapi'i Nasution S.Pd selaku kepala sekolah berpendapat bahwa proses kegiatan administratif sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah No 41 tahun 2009 bahwa guru yang akan mendapat dana tunjangan harus mengikuti prosedur atau aturan aturan yang berlaku. Seperti memiliki sertifikat pendidikan dengan jumlah jam mengajar 24 jam perhari, serta aturan lain yang telah tercantum dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati S.Pd mengatakan bahwa proses kegiatan administratif dalam melaksanakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut belum berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan dalam proses yang dilaksanakan masih terdapatnya pegawai administratif yang memungut biaya diluar prosedur. Hal yang sama di ucapkan oleh ibu Marito Gultom S.Pd bahwasanya masih ada pemotongan di administrasi yang dilakukan oleh pegawai administratif. Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Tumatik S.Pd bahwasannya proses kegiatan administratif sudah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya belum begitu baik dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suparsih S.Pd selaku badan pengawas sekolah mengatakan prosedur yang dilaksanakan berdasarkan dari tingkat tertinggi yaitu pemerintah pusat kemudian dilanjutkan untuk dikirim melalui provinsi, kabupaten/kota , kemudian dikirim langsung kerekening masing-masing guru.

#### **4. Adanya Manfaat Pelaksanaan Kebijakan**

Adanya manfaat pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta meningkatkan profesionalitas guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak syapi'i Nasution selaku kepala sekolah bahwasannya manfaat yang dirasakan oleh para guru penerima dana tunjangan yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang pemberian dana tunjangan yaitu sangat merasakan manfaat apa yang diberikan oleh pemerintah . baik dari segi perekonomian dan segi lainnya. Menurut ibu Rahmawati S.Pd bahwasannya dana tunjangan yang diberikan untuk guru jelas dapat memberikan manfaat yang lebih baik dari segi perekonomiannya maupun yang lainnya. Hal yang sama disampaikan oleh ibu Marito Gultom S.Pd bahwasannya dana tunjangan yang diberikan untuk seorang guru yang berhak mendapatkan dana tunjangan tersebut maka jelaslah terbantu perekonomiannya. Hal yang sama dikatakan oleh ibu Suparsih selaku pengawas sekolah bahwasannya dana tunjangan yang telah tersalurkan dapat digunakan sebagai motivasi penunjang untuk dapat meningkatkan kinerja serta dapat meningkatkan mutu pendidikan.

#### **B. Analisis Hasil Wawancara**

##### **1. Adanya Aspek Yang Mempengaruhi Kehidupan**

Dari hasil penelitian dan wawancara di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur dengan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa adanya

aspek yang berpengaruh terhadap profesionalitas guru dalam meningkatkan kinerja. Hal ini sesuai yang ditanggapi oleh Bapak Syapi'i Nasution, S.Pd selaku kepala sekolah di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwasannya pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen yang sangat berhubungan dengan adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan guru telah dijalankan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik

Sesuai dengan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan guru yaitu pemerintah telah membantu kehidupan ekonomi guru agar lebih sejahtera sesuai yang dikatakan oleh ibu Rahmawati, S.Pd selaku guru PNS di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwa adanya kebijakan pemerintah yang menyangkut dengan dana tunjangan sangat membantu perekonomian guru sehingga guru sangat puas dengan tujuan pemerintah dalam mensejahterakan guru dalam profesionalitas seorang guru. Hal yang sama dikatakan oleh ibu Marito Gultom, S.Pd selaku guru PNS di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwasannya aspek yang mempengaruhi kehidupan guru yaitu mampu meningkatkan perekonomian guru agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugas seperti membimbing peserta didiknya yang sesuai dengan tugas sebagai seorang guru. Hal yang sama di kemukakan oleh ibu Tumatik S.Pd selaku guru SD 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwasannya aspek yang mempengaruhi kehidupan guru sesuai dengan yang diharapkannya. Ia merasakan bahwa perekonomian keluarganya jelas terbantu dengan adanya kebijakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru

dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen , serta tunjangan kehormatan profesor.

Bedasarkan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan bahwasannya dana tunjangan tersebut sangat membatu perekonomian guru sehingga kedisiplinan serta profesionalitas guru terjalin dengan baik.

Sesuai dengan pendapat Tangklisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Berdasarkan peraturan pemerintah no 41 tahun2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor dapat disimpulkan bahwa tunjangan yang sering juga disebut sebagai benefit seperti yang dikemukakan oleh Moekijat (1999:173) benefit dapat dipandang sebagai sumbangan-sumbangan yang berwujud uang kepada pegawai, misalnya pembayaran khusus kepada pegawai yang sakit, asuransi, perawatan rumah sakit, pensiun dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 terkait dengan dana tunjangan yang dapat mempengaruhi kehidupan guru sudah terimplementasikan dengan baik serta berpengaruh dalam bidang pendidikan yang

sesuai dengan tujuan kebijakan untuk kesejahteraan guru serta profesionalitas guru.

## **2. Adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul**

Adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul adalah masalah yang terjadi dalam sekolah pada umumnya mengenai mutu pendidikan dan profesionalitas guru. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syapi'i Nasution S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur mengatakan bahwa dengan adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul yaitu masalah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD ini serta untuk meningkatkan kinerja guru yang masih rendah. Munculnya masalah tersebut mengakibatkan pemerintah menerbitkan kebijakan dana tunjangan tersebut untuk mendorong kinerja para guru agar lebih disiplin, semangat dalam memberikan pelajaran dan melatih anak didiknya sehingga mutu pendidikan sekolah tersebut dapat meningkat.

Tujuan pemerintah menerbitkan peraturan tersebut adalah sebagai faktor penunjang agar guru dapat berkerja lebih baik serta meningkatkan disiplin kerja guru agar dapat dijalankan dengan baik oleh para guru. Pemerintah sudah sedemikian rupa melakukan suatu perubahan dalam dunia pendidikan agar mutu pendidikan di sekolah sekolah lebih meningkat sejak diterbitkannya peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru, kehidupan perekonomian sudah sangat terbantu dan lebih sejahtera. Dengan penerbitan kebijakan tersebut pemerintah berharap agar pendidik yang memiliki peran

sebagai seorang guru yang sangat signifikan dalam proses belajar mengajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal seperti sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator dan sebagainya. Yang akan dikemukakan disini adalah peran yang dianggap paling dominan dan klasifikasi guru sebagai :

1. Demonstrator
2. Manajer/pengelola kelas
3. Mediator/fasilitator
4. Evaluator

Diharapkan para guru untuk melaksanakan tugas dengan baik agar masalah di dunia pendidikan dapat terselesaikan dengan adanya peraturan pemerintah no 41 tahun 2009. Sama halnya dengan hasil wawancara dengan ibu Rahmawati S.Pd, bahwasannya adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul pemerintah menerbitkan suatu kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara menyalurkan salah satu apresiasi berupa dana tunjangan yang diberikan untuk guru dalam mensejahterakan kehidupan para guru agar lebih giat lagi dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas serta menegakkan kedisiplinan dalam aktivitas sehari-hari.

Adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul dari kebijakan pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai penunjang untuk mengatasi masalah yang muncul dalam kehidupan guru. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pemerintah sebagai figur yang mampu mengatasi masalah masyarakat termasuk guru. Pemerintah harus mampu mengatasi masalah yang

muncul sehingga guru sebagai tenaga pendidik yang bertugas sebagai pengajar untuk mencerdaskan anak didiknya dapat dibeikan tunjangan sebagai faktor pendorong diri agar lebih baik serta dengan terdorongnya diri untuk melakukan proses belajar mengajar dengan demikian juga kualitas atau mutu pendidikan juga dapat terdorong dengan sendirinya.

Dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendorong kinerja guru agar dapat bekerja lebih baik, disiplin, serta profesional dalam melakukan proses atau kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, berdasarkan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen tersebut dapat mengatasi masalah yang muncul dalam dunia pendidikan, baik dari segi mutu pendidikan serta dari segi perekonomian guru.

Dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul baik dalam dunia pendidikan atau dalam masalah yang lain sudah dapat teratasi ,walaupun dalam pelaksanaannya belum terlaksan dengan baik, sehingga dapat dikatakan, bahwa peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 dalam mengatasi masalah yang muncul sudah bernilai positif.

### **3. Adanya Proses Kegiatan Administratif**

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya proses kegiatan administratif merupakan salah satu bentuk atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kebijakan tersebut dapat

dijalankan. sehubungan dengan ini adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah tersebut.

Syarat untuk guru yang menerima Bantuan Kesejahteraan Non Sertifikasi yang bersumber dari dana APBD Kota, APBD Provinsi, APBN yaitu guru yang telah memiliki NUPTK dari Kota Binjai, dan guru yang telah terdaftar dalam data DAPODIK untuk tingkat SD dan SMP. Serta untuk kelengkapan lainnya yang diusulkan dari Dinas Pendidikan Kota Medan yaitu fotocopy print out NUPTK, fotocopy kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), surat pernyataan jam mengajar, fotocopy ijazah terakhir, fotocopy Rekening Bank.

Semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh guru-guru yang ingin mendapatkan tunjangan yang diberikan pemerintah tersebut. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi maka harus ditanda tangani oleh kepala sekolah kemudian data-data yang telah dipenuhi sebagai kelengkapan syarat untuk mendapatkan tunjangan tersebut dan kemudian akan dikirim ke Dinas Pendidikan. Kemudian selanjutnya dikirimkan pemerintah daerah serta pemerintah pusat agar dana dapat terealisasi dengan cepat ke rekening masing-masing guru.

Sesuai dengan tujuan pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut, yaitu untuk mensejahterakan kehidupan guru, selain itu kebijakan ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan pengabdian dan profesionalisme guru sehingga dapat melaksanakan tugas profesinya dengan maksimal. Khususnya dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Maka, dapat dikatakan kebijakan tersebut sudah terimplementasikan, dan berjalan dengan baik. Namun,

untuk proses kegiatan administratif masih adanya kegiatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh pihak administrasi pendidikan dalam pendistribusian dana kebijakan peraturan pemerintah tersebut.

Adanya proses kegiatan administratif merupakan pemaparan atau merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli Menurut Tachjan (2006:25) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Adanya proses kegiatan administratif merupakan suatu kegiatan yang dijalankan setelah kebijakan tunjangan tersebut ditetapkan. tunjangan adalah kompensasi tambahan (financial/non finansial) yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan/instansi terhadap semua karyawan/pegawai (guru) dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka . adanya proses kegiatan administratif merupakan proses untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga dapat diterima dan sampai kepada masing-masing guru. Namun, hal yang sangat mengecewakan bagi guru yang menerima dana tunjangan tersebut adalah dipatoknya potongan dari dana yang mereka terima sehingga dana tunjangan tersebut tidak bisa diterima sepenuhnya oleh para guru.

Dapat disimpulkan bahwa, adanya proses kegiatan administratif dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya faktor yang menjai penghambat serta adanya oknum yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, yaitu pegawai administratif yang melakukan potongan secara dipatok, sehingga dapat dikatakan kebijakan belum terimplementasi dengan baik.

#### **4. Adanya Manfaat Pelaksanaan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rahmawati S.Pd selaku guru yang menerima dana tunjangan bahwa adanya manfaat pelaksanaan kebijakan yaitu mempengaruhi kehidupan guru agar lebih sejahtera dan dengan adanya peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut kinerja guru semakin baik seperti dalam bentuk keisiplinan dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya manfaat pelaksanaan kebijakan yaitu berupa manfaat yang dapat membantu perekonomian , sebagai faktor pendorong agar tercipta guru yang profesional dalam memberikan pelajaran kepada anak murid/siswa/i nya. Adanya manfaat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu kebijakan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut dapat memberikan dampak/perubahan pada masing-masing guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru serta mampu mempengaruhi kinerja guru walaupun tidak seluruh guru yang memberikan perubahan yang lebih baik. adanya manfaat pelaksanaan kebijakan yaitu membantu guru dalam bidang ekonomi lebih sejahtera serta dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Sesuai dengan tugas, guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasikan dalam bentuk pegabdian. Tugas tersebut meliputi mendidik, mengajar serta melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa agar tercipta siswa yang dapat membanggakan bangsa dan negara.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, adanya manfaat pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan profesor dalam dalam rangka kesejahteraan guru di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur tersebut sangat besar manfaat yang diterima oleh para guru sehingga kebijakan tersebut mampu mendorong serta memotivasi guru agar lebih baik dalam memberikan pelajaran kepada peserta didiknya. Dari variabel implementasi peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut, dapat disimpulkan yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini yaitu :

- a. Adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan, sudah berjalan dengan baik karena kebijakan yang diterbitkan tersebut telah mempengaruhi kehidupan guru sert berpengaruh dalam tingkat profesionalitas
- b. Adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul, dan sudah berjalan dengan baik.
- c. Adanya proses kegiatan administratif, sudah berjalan namun belum dapat dikatakan berjalan dengan baik.
- d. Adanya manfaat dalam pelaksanaan kebijakan, sudah berjalan dengan baik. karena manfaat diterima sangat membantu kehidupan para guru agar lebih sejahtera.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan telah dibahas dalam permasalahan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Doaen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor dalam Rangka Meningkatkan kesejahteraan guru di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur sudah berjalan cukup baik.

1. Implementasi peraturan pemerintah No 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan profesor dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Guru di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur telah dijalankan dengan cukup baik. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yang pertama yaitu : adanya aspek yang memprngaruhi kehidupan yang dapat berpengaruh dalam perekonomian para guru, serta meningkatkan profesionalitas guru dalam memberikan pelajaran terhadap peserta didiknya. Kedua, adanya tujuan mengatasi masalah, yaitu masalah yang muncul dalam dunia pendidikan seperti rendahnya kualitas guru dalam melatih peserta didiknya agar tercipta pribadi yang profesional, serta masalah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, peraturan pemerintah no 41 tahun2009 tersebut telah dijalankan dan dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam dunia

pendidikan tersebut. Ketiga, adanya proses kegiatan administrasi seperti tata cara atau prosedur dalam menjalankan kebijakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut sehingga akhirnya dana tunjangan tersebut sampai ke rekening masing-masing guru. Keempat, adanya manfaat pelaksanaan kebijakan yaitu berupa manfaat dari segi ekonomi serta untuk instansi pendidikan.

Dengan demikian dari keempat kategorisasi tersebut telah dijalankan , sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan pemerintah No 41 tahun 2009 telah berjalan di Sekolah Dasar Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur.

2. Dalam Pelaksanaan Implementasi No 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen ,Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan profesor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur. Masih terdapat beberapa kendala dalam pendistribusiannya yakni berupa dana yang terhambat di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. seperti dana tunjangan yang telah dikirim melalui pemerintah pusat yang kemudian ditujukan atau dikirim ke daerah belum terealisasikan dengan baik,hal ini dikarenakan proses pendataan yang belum sempurna sehingga dana yang seharusnya dikirim tepat waktu tidak dapat diterima sesuai dengan waktu yang telah di tentukan dalam peraturan pemerintah no 41 tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 masih belum terlaksana dengan baik dalam pendistribusiannya.

**B. Saran**

1. Sebaiknya dana tunjangan yang diberikan sebagai alat untuk memicu dalam meningkatkan kinerja guru
2. Sebaiknya dana tunjangan yang diberikan sebagai alat untuk memicu dalam meningkatkan kedisiplinan guru
3. Sebaiknya kepala sekolah dan seluruh guru yang ada di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur tersebut mampu meningkatkan kerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan mutu pendidikan serta mencerdaskan peserta didiknya.
4. Hendaknya dana tunjangan yang diberikan baik kepada guru atau kepala sekolah dapat digunakan dengan baik sesuai prosedur yang ada dan meningkatkan kesejahteraan para guru di SD Negeri 028068 tersebut.
5. Hendaknya dana tunjangan yang diberikan seharusnya benar-benar ditujukan untuk memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Syukur, 1988 : **Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi**, Makalah yang Disajikan Pada Temu Kaji Nasional PERSADI FISIP Hasanuddin Ujung Pandang.

Abidin, Said Zainal, 2006 : **Kebijakan Publik**, Suara Bebas Jakarta.

Abdul Wahab, 1991 : **Implementasi Kebijakan Publik**, Bumi Rieneka Cipta  
Jakarta

Anderson, 2005 : **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Bandung.

Dessler, Gary . Manajemen Sumber Daya Manajemen, Preshalindo, Ahli Bahasa,  
Benyamin Molan,1993.

Dunn, william N,2003 : **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Bandung.

Dwijowijoto , 2004 : **Implementasi Kebijakan**, Yogyakarta

Dye,Thomas R.2007: **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Rosdakarya Bandung

Friedrich,Carl J.2007. **Kebijakan Publik**, Bandung:Mandar Maju

Grindle, merilee, 1980 : **Politik dan Implementasi Kebijakan dalam World Ketiga**, Priceton University Prees, Newjersey

Hasibuan , H. Malayu SP.(1999). Organisasi Dan Motivasi. Jakarta : Bumi Aksara

- Mustopadidjaja, 2002. **Manajemen Proses Kebijakan Publik**. Jakarta:  
Lembaga Administrasi Negara.
- Moekijat.(1999). Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen kepegawaian ).  
Bandung : CV.Mandar Maju.
- Tachjan, 2006. **Implementasi Kebijakan Publik**, Bandung AIPI dan puslit  
KP2W Lembaga penelitian unpad.
- Dye,Thomas R.2007: **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Rosdakarya Bandung
- Wahab,s.2005. **Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi  
Kebijakan**. Media pressindo, Yogyakarta
- Widodo, joko.2011: **Analisis Kebijakan publik**. Bayumedia Publishing ,  
Malang.
- W.J.S Poerdaminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia** , (Jakarta : Balai Pustaka,  
1991, cet12
- Nata , Abuddin, **Metodologi Studi Islam**, Jakarta : PT. Raja Grafindo  
Persada,1999.
- Nawawi,hadari, 1992 : **Uraian Teoritis**, Gajah Mada university press,  
Yogyakarta
- Ripley dan Franklin , 1986 : **Pendekatan Implementasi dan Tipe Kebijakan**.  
Jakarta.

Rostiyah .2000. pengertian guru dalam proses belajar mengajar. Jakarta: Bumi  
Aksara

Setiawan,Guntur.2004. **Implementasi Birokrasi**. Bandung : Remaja Rosdakarya

Susilo,2007.**Effective policy implementasi**. Lexington : Mass. D.C.Health.

SK/KEMENKEU 101/PMK.05/2010.**Tunjangan Kehormatan Profesor.Jakarta**  
**,KEMENDIKBUD**

Tangklisan,patton.2003. **Kebijakan Publik yang Membumi**, Lukman offset  
dan YPAPI, Yogyakarta.

Winarno, 2005.**Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan**, Media  
Pressindo, yogyakarta.

Sumber dikutip dari petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi kemendikbud.  
Peraturan pemerintah no 41 tahun 2009

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rabiatul Adawiyah  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Binjai, 22 Juni 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum menikah  
Kesehatan : Baik  
Agama : Islam  
Alamat rumah : Jl. Danau poso komp.pasar 3 No 8 km 18 Binjai.  
Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur  
No Handphone : 085214130405  
Email : [rabiatul.adawiyah452@gmail.com](mailto:rabiatul.adawiyah452@gmail.com)

### **PENDIDIKAN**

2000 - 2001 : Tamatan TK Fina Barokah Binjai  
2001 - 2007 : Tamatan SD Muhammadiyah-02 Binjai  
2007 - 2010 : Tamatan SMP Negeri 12 Binjai  
2010 - 2013 : Tamatan SMA Negeri 4 Binjai  
2013 - 2017 : Terdaftar Sebagai Mahasiswa FISIP UMSU  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik.

Medan, 2 Maret 2017

Rabiatul Adawiyah